

**PENDIDIKAN GRATIS:
Analisis Konsep dan Implementasinya di Indonesia**

Muhammad

muhammad83@uinmataram.ac.id

Universitas Islam Negeri Mataram

Abstrak:

Pendidikan gratis masih terus berkembang di masyarakat dengan pemahaman masing-masing. Kontroversi pun masih terus berkembang walaupun berbagai sosialisasi terus dilakukan. Di sisi lain, pendidikan gratis sering dipadankan dengan mutu rendah. Sehingga tidak sedikit orang memandang enteng, acuh tak acuh bahkan meremehkannya. Tulisan ini bertujuan untuk membahas pendidikan gratis di Indonesia: konsep dan implementasinya. Metode penelitian menggunakan *Literatur Systematic Review* (SLR), yakni mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi temuan-temuan penelitian terkait dengan topik bahasan. Hasil temuan menunjukkan bahwa pendidikan gratis di Indonesia diatur melalui skema Program Wajib Belajar dan Program Indonesia Pintar, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah menanggung seluruh pembiayaan pendidikan. Meskipun pada tataran implementasi pendidikan gratis masih ditemukan berbagai pungutan yang dibebankan kepada siswa, namun secara umum dapat disimpulkan telah berjalan dengan baik, memenuhi standar mutu pendidikan dan juga tuntutan akreditasi

Kata kunci: *Pendidikan Gratis, Pendidikan Bermutu, Dana BOS, Wajib Belajar, Program Indonesia Pintar (PIP)*

Pendahuluan

Kata gratis pada “Pendidikan Gratis”, secara bahasa merujuk kepada makna tidak dipungut bayaran atau cuma-cuma.¹ Kata gratis memiliki daya tarik tersendiri jika digandengkan dengan sesuatu yang bernilai, misalnya, minyak goreng gratis², sembako gratis³, vaksin gratis⁴ dapat menarik perhatian banyak orang sehingga tidak jarang

¹ “Arti Kata Gratis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed May 16, 2022, <https://kbbi.web.id/gratis>.

² Hasriyani Latif, “Buruan! Ada Promo Minyak Goreng Gratis di Indomaret Hari Ini Kamis 20 Januari 2022, Simak Cara Dapat,” *Tribun-timur.com*, February 20, 2022, <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/20/buruan-ada-promo-minyak-goreng-gratis-di-indomaret-hari-ini-kamis-20-januari-2022-simak-cara-dapat>; Suhendar, “Harga Minyak Goreng dan Sembako Naik, Warga Antusias Dapat Sembako Gratis,” *TvOneNews*, March 23, 2022, <https://www.tvonenews.com/daerah/jabar/33035-harga-minyak-goreng-dan-sembako-naik-warga-antusias-dapat-sembako-gratis>.

³ Rengga Sancaya, “Potret Warga Antre Sembako Gratis saat PSBB,” *detiknews*, September 25, 2020, <https://news.detik.com/foto-news/d-5187601/potret-warga-antre-sembako-gratis-saat-psbb>; Kompasiana.com, “Begini Rasanya Berdesakan Antri Sembako Gratis,” *KOMPASIANA*, July 20, 2013, <https://www.kompasiana.com/estherlima/55290c7e6ea834261f8b45b6/begini-rasanya-berdesakan-antri-sembako-gratis>.

⁴ Saufat Endrawan, “Gratis Sembako, Ratusan Warga Rela Antri Vaksin: Okezone Video,” <https://video.okezone.com/>, July 7, 2021, <https://video.okezone.com/play/2021/07/07/1/136080/gratis-sembako-ratusan-warga-rela-antri-vaksin>.

orang rela antri, berdesak-desakan, bahkan juga sampai menimbulkan korban jiwa untuk memperoleh barang gratis.⁵ Demikian juga kata pendidikan jika digandengkan dengan kata gratis. Pendidikan gratis dapat meningkatkan animo masyarakat untuk masuk atau melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi.⁶ Bahkan tidak jarang pendidikan gratis sebagai “jualan politik” suatu lembaga pendidikan atau bahkan juga oleh kandidat calon kepala daerah atau calon legislatif.⁷

Pelayanan pendidikan gratis diidamkan oleh banyak orang. Masyarakat yang tidak mampu tidak perlu dikenakan pungutan biaya hingga mereka selesai menamatkannya. Aturan formal yang berlaku di negara ini pun telah mengamanatkan agar “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya”.⁸ Pasal 34 (2) UU No. 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”⁹

Pendidikan gratis masih terus berkembang di masyarakat dengan pemahaman masing-masing. Antara pemerintah sebagai pemangku dan pelaksana kebijakan dengan masyarakat tidak memiliki satu pemahaman yang sama. Kontroversi pun masih terus berkembang walaupun berbagai sosialisasi terus dilakukan.¹⁰

Di sisi lain pendidikan gratis sering kali dipadankan dengan kualitas mutu rendah. Sehingga tidak sedikit orang memandang enteng, acuh tak acuh bahkan

⁵ Kompas Cyber Media, “Emak-emak Meninggal Saat Antre Minyak Goreng, Pengamat: Memilukan... Halaman all,” KOMPAS.com, March 12, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/03/12/191131678/emak-emak-meninggal-saat-antre-minyak-goreng-pengamat-memilukan>.

⁶ Omat, “Pendidikan Gratis Tingkatkan Animo Masyarakat Masuk SMA,” Orbit Banten, July 4, 2019, <http://orbitbanten.co.id/pendidikan-gratis-tingkatkan-animo-masyarakat-masuk-sma/>; Kompasiana.com, “Tanggapan Masyarakat Mengenai Pendidikan Gratis,” KOMPASIANA, May 3, 2017, <https://www.kompasiana.com/nurulsapriahdianti/5909176bb993735c3914bda5/tanggapan-masyarakat-mengenai-pendidikan-gratis>.

⁷ Diyan Nur Rakhmah Wisudawati, “Isu Pendidikan dalam Kampanye Politik,” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 20, no. 4 (December 18, 2014): 579–87, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i4.167>; Agung Sasongko, “Capres Kampanye Sekolah Gratis Kurang Relevan,” *Republika Online*, May 2, 2014, <https://republika.co.id/berita/nasional/politik/14/05/02/n4y7d6-capres-kampanye-sekolah-gratis-kurang-relevan>; DetikNews, “Kampanye Sekolah Gratis Dinilai Hanya Janji Surga,” *detiknews*, 2007, <https://news.detik.com/berita/d-810468/kampanye-sekolah-gratis-dinilai-hanya-janji-surga->.

⁸ Pasal 31 (2). Lihat “Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Dan Amandemen,” accessed June 11, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->.

⁹ “Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” accessed June 11, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>.

¹⁰ Ema, “Definisi Sekolah Gratis Perlu Diluruskan,” *Sripoku.com*, February 10, 2010, <https://palembang.tribunnews.com/02/08/2010/definisi-sekolah-gratis-perlu-diluruskan>.

meremehkannya. Semangat belajar siswa karena minim tantangan; tidak biaya yang harus dibayar. Guru mengalami keterbatasan dalam mengembangkan potensi dan kompetensi keguruannya sebab harus berpikir soal “bertahan hidup” yang akhirnya akan kesulitan memotivasi peserta didik. Sekolah akan kesulitan menutup biaya operasional sekolah, apalagi menyejahterakan gurunya. Tanpa iuran dari peserta didik, bagaimana akan menutup pembiayaan itu.¹¹

Tulisan ini bertujuan untuk membahas pendidikan gratis di Indonesia: konsep dan implementasinya. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana konsep dan implementasi pendidikan gratis serta bagaimana pula mutu pelaksanaannya? Untuk menjawab pertanyaan (*research question*) di atas, penulis menggunakan metode *Literatur Systematic Review* (SLR), yakni mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi temuan-temuan penelitian terkait dengan topic bahasan.

Konsep Pendidikan Gratis di Indonesia

Dalam rangka mewujudkan amanah agung, cita-cita mulia ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ sebagaimana yang dimuat dalam *preamble* UUD 1945, Pemerintah menetapkan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 (2) UUD 1945 hasil Amandemen.¹² Selanjutnya Undang-Undang Sisdiknas Pasal 34 (2) menegaskan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”¹³

Pendidikan tanpa biaya atau yang disebut ***Pendidikan Gratis*** adalah pendidikan yang membebaskan siswa dari segala pungutan biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan pendidikan tersebut, baik pada aspek input, proses, maupun keluarannya.¹⁴ Jika ditelusur pada landasan formal pendidikan di Indonesia, nomenklatur “pendidikan gratis” sesungguhnya tidak ditemukan dalam tatanan perundang-undangan. Namun,

¹¹ Desy Eka Citra, “Fenomena Pendidikan Gratis Dalam Pembiayaan Pendidikan,” *At-Ta’lim : Media Informasi Pendidikan Islam* 14, no. 2 (October 19, 2017): 304–18, <https://doi.org/10.29300/attalim.v14i2.276>.

¹² Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen.

¹³ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁴ Lihat Rusman Roni, “PENDIDIKAN GRATIS BERBASIS 5 PILAR MANAJEMEN MUTU TERPADU,” *Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan* 3, no. 2 (2009), <http://www.ejournal.sumselprov.go.id/pptk/article/view/173>.

memahami definisi pendidikan gratis dalam konteks pembebasan biaya pendidikan bagi siswa oleh penyelenggara pendidikan, dalam hal ini pemerintah hadir membiayainya, terdapat beberapa program yang dapat dirujuk untuk makna pendidikan gratis, yaitu Program Wajib Belajar, dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Pertama, Program Wajib Belajar sebagaimana tertuang dalam UU No 20 tahun 2003 adalah “program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.¹⁵ Dan Pasal 6 (1) UU Sisdiknas menegaskan bahwa “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.¹⁶ Berdasarkan pasal 6 (1), usia wajib belajar 9 tahun adalah 7 s.d. 15 tahun. Ada upaya pemerintah untuk meningkatkan usia wajib belajar ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun bagi anak usia 6 s.d. 21 tahun.¹⁷ Namun wajib belajar 12 tahun pernah ditolak Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan melalui putusan MK No 92/PUU-XII/2014.¹⁸

Penyelenggaraan wajib belajar melalui 2 jalur, yaitu formal dan nonformal. Pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar; SD/MI, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat. Jalur nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, atau bentuk lain yang sederajat.¹⁹ Pengelolaan program wajib belajar secara nasional menjadi tanggung jawab Menteri.²⁰ Namun Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk (a) meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah; (b) mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah termasuk kewenangan memberikan sanksi administratif kepada warga negara Indonesia yang

¹⁵ Lihat pasal 1 (18) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁶ Lihat pasal 6 (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁷ Wacana Wajib belajar 12 tahun terus bergulir hingga sekarang. Bagi yang Pro, Wajib Belajar 12 tahun memiliki banyak kelebihan, di antaranya dapat menekan perkawinan dini. Lihat JawaPos.com, “Wajib Belajar 12 Tahun Dikatakan Bisa Tekan Perkawinan Anak,” JawaPos.com, December 4, 2020, <https://www.jawapos.com/nasional/04/12/2020/wajib-belajar-12-tahun-dikatakan-bisa-tekan-perkawinan-anak/>.

¹⁸ HP3342, “Dasar Hukum Wajib Belajar 12 Tahun,” SUKA SUKA (blog), May 26, 2018, <https://hp3342.wordpress.com/2018/05/26/dasar-hukum-wajib-belajar-12-tahun/>.

¹⁹ Lihat pasal ayat 2 dan 3 “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar,” accessed June 13, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4861/pp-no-47-tahun-2008>.

²⁰ Lihat pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar.²¹

Selanjutnya, dalam rangka mendukung program wajib belajar yang bermutu, Pemerintah menggunakan APBN melalui skema Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk pembiayaan pendidikan untuk membebaskan seluruh pungutan yang ditujukan kepada seluruh siswa terhadap biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta.²² Dana BOS (APBN, Pusat) ini diperuntukkan untuk jenjang SD hingga SMP. Adapun Dana BOS untuk jenjang SMA/MA/SMK bersumber dari dana APBD (Daerah). Besarnya dana BOS ini sangat ditentukan oleh jumlah siswa di sekolah yang bersangkutan.

Meskipun biaya operasional ditanggung pemerintah, peserta didik, orang tua, dan/atau wali bertanggung jawab atas (1) Biaya pribadi peserta didik, misalnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dan lain sebagainya; (2) Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional.²³

Kedua, Program Indonesia Pintar atau yang biasa disingkat PIP, sebagaimana yang tercantum dalam Permendikbud no. 10/2020 adalah “bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.”²⁴ Pengertian ini memperluas cakupan dan sasaran PIP dari Permendikbud no. 19/2016 yang menyebutkan PIP itu hanya berupa uang tunai

²¹ Lihat pasal 7 ayat 4 – 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

²² Lihat lampiran “Permendikbud No. 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 [JDIH BPK RI],” 201, accessed June 18, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163918/permendikbud-no-37-tahun-2010>.

²³ Permendikbud No. 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 [JDIH BPK RI].

²⁴ Lihat pasal 1 ayat 1 “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar” (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163716/permendikbud-no-10-tahun-2020>.

yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu.²⁵

Sasaran PIP meliputi 3 level pendidikan; pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Bagi pendidikan dasar dan pendidikan menengah, PIP bertujuan untuk: (1). meningkatkan akses untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah; (2). mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) akibat kesulitan ekonomi; (3). menarik siswa putus sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Bagi pendidikan tinggi, PIP bertujuan untuk: (1). meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi; (2). meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik.²⁶

Pendidikan gratis adalah membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik/ orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah. Secara umum pendidikan gratis dapat dibahasakan sebagai skema pembiayaan pendidikan dasar dan menengah yang ditanggulangi bersama oleh pemerintah bersama pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota, guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan peserta didik. Penyelenggaraan pendidikan gratis merupakan program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijaksanaan pembiayaan, penataan pengembangan, pengawasan, serta pengendalian program pendidikan gratis.²⁷

Memperhatikan uraian di atas, pendidikan gratis memiliki tujuan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak usia sekolah, meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan mutu penyelenggran pendidikan serta lulusan. Dengan demikian, pendidikan gratis di Indonesia diatur melalui skema Program Wajib Belajar dan Program Indonesia Pintar. Yang seluruh pembiayaan itu ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

²⁵ Lihat pasal 1 ayat 1 “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar” (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138486/permendikbud-no-19-tahun-2016>.

²⁶ Lihat pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Lihat juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar.

²⁷ Saparuddin, “Pengaruh Pendidikan Gratis terhadap Motivasi Belajar Siswa MIS Yapit Bontosunggu Pattabakkan Kec.Tompobulu Kab. Gowa” (Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6319/1/SAPARUDDIN_opt.pdf.

Pendidikan Gratis vs Pendidikan Bermutu

Tulisan ini tidak sedang membandingkan pendidikan gratis versus pendidikan bermutu. Tetapi hendak meninjau kembali pada aspek konsep ideal dan implementasi program pendidikan gratis yang memang selalu menarik untuk dikaji dan juga telah mampu membuktikan diri sebagai pendidikan bermutu.

Secara umum pendidikan gratis dapat dibahasakan sebagai skema pembiayaan pendidikan dasar dan menengah yang ditanggulangi bersama oleh Pemerintah bersama Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota), untuk membebaskan atau meringankan siswa dari pungutan biaya pendidikan. Sementara pendidikan yang bermutu dipahami sebagai pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, baik akademik, kejuruan, personal dan sosial serta nilai-nilai akhlak mulia.²⁸ Pendidikan bermutu dapat terbangun apabila terselenggara secara teroganisir dan sistemik diantara berbagai komponen pendidikan.²⁹

Komponen standar mutu penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah ditetapkan oleh PP No 57 Tahun 2021 menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan; b) standar isi; c. standar proses; d. standar penilaian Pendidikan; e. standar tenaga kependidikan; f. standar sarana dan prasarana; g. standar pengelolaan; dan h. standar pembiayaan.³⁰

Sekolah bermutu menurut Hoy dan Miskel, sebagaimana dikutip oleh Turmidzi adalah sekolah yang efektif, yang terdiri dari tatanan input, proses, dan output.³¹ Demikian juga pendidikan gratis dilaksanakan dengan proses yang bermutu pula baik merujuk pada hasil akreditasi, input, proses, output maupun outcome pendidikan.³² Output dinyatakan bermutu apabila hasil belajar akademik dan nonakademik siswa

²⁸ Hari Suderadjat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK* (Bandung: Cipta Lekas Grafika, 2005), 17.

²⁹ Asep Ediana Latip and Nafia Wafiqni, "ANALISIS MUTU IMPLEMENTASI PENDIDIKAN GRATIS DI JABODETABEK," *JMIE (Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education)* 1, no. 1 (May 31, 2017): 96, <https://doi.org/10.32934/jmie.v1i1.27>.

³⁰ Pasal 3 "PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan [JDIH BPK RI]," accessed June 18, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021>.

³¹ Imam Turmidzi, "PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERMUTU DI MADRASAH," *Tarbawi: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 4, no. 2 (August 21, 2021): 169, <https://doi.org/10.51476/tarbawi.v4i2.264>.

³² Latip and Wafiqni, "ANALISIS MUTU IMPLEMENTASI PENDIDIKAN GRATIS DI JABODETABEK," 96.

tinggi. *Outcome* dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatannya lulusannya dan merasa puas.³³

Penyelenggaraan pendidikan gratis merupakan program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijaksanaan pembiayaan, penataan pengembangan, pengawasan, serta pengendalian program pendidikan gratis.³⁴ Implementasi pendidikan gratis yang dilaksanakan pada sekolah juga mencakup unsur: perencanaan (*plaining*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuaiting*), pengawasan (*controlling*), dan penilaian (*evaluating*) agar diketahui sejauhmana ketercapaian program pendidikan gratis itu sendiri.³⁵

Beberapa hasil penelitian berikut, peneliti paparkan untuk mengonfirmasi pertanyaan banyak kalangan yang menyebutkan apakah pendidikan gratis dapat mempertahankan mutu pendidikannya.

Pertama, hasil penelitian Asep Ediana Latip dan Nafia Wafiqni yang dipublikasi pada tahun 2017 silam yang menganalisis mutu implementasi pendidikan gratis di Jabodetabek.³⁶ Mereka menyebutkan bahwa implementasi pendidikan gratis di Jabodetabek telah memenuhi standar mutu pendidikan baik dilihat dari input, proses, output, dan outcome pendidikan. Dilihat dari standar mutu pendidikan berbasis akreditasi, mutu pendidikan gratis di Jabodetabek memenuhi standar mutu pendidikan dengan perolehan nilai A. Model implementasi pendidikan gratis dari pendanaannya tergambar dalam tiga model pendidikan yaitu pembebasan segala jenis pungutan oleh sekolah terhadap orang tua, Pembebasan biaya operasional pendidikan terhadap orang tua kecuali biaya untuk kebutuhan pribadi seperti seragam sekolah dan pembiayaan operasional pendidikan dibebankan pada dana BOS (Biaya Operasional Sekolah).

Dampak implementasi pendidikan gratis berdasarkan pada mutu input, proses, output, dan outcome, serta mutu akreditasi juga model implementasi pendidikan gratis bagi orang tua, implementasi pendidikan gratis di Jabodetabek dengan standar mutunya tetap memiliki partisipasi dari masyarakat, memiliki kepuasan atas lulusannya, dan terbantu dari pembiayaan pendidikan secara gratis. Bagi guru berdasarkan pada

³³ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 410.

³⁴ Saparuddin, "Pengaruh Pendidikan Gratis."

³⁵ Muljono Damopolii, *Idealisasi atau Politisasi? Program Pendidikan Gratis*, (Cet. I, Gowa: Alauddin University Press, 2012), h. 52-53

³⁶ Latip and Wafiqni, "ANALISIS MUTU IMPLEMENTASI PENDIDIKAN GRATIS DI JABODETABEK."

perolehan data tentang mutu pendidikan gratis, guru melaksanakan pembelajaran belum memenuhi standar proses pembelajaran dengan optimal.³⁷

Kedua, hasil penelitian Muzakkir tahun 2017 tentang persepsi siswa tentang penerapan pendidikan gratis hubungannya dengan mutu pendidikan siswa SMAN 1 Woja Kabupaten Dompus. Temuan Muzakkir menyebutkan bahwa penerapan pendidikan gratis ada hubungannya dengan mutu pendidikan atau hasil belajar siswa, maksudnya dalam hal ini program pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah daerah kabupaten Dompus tidak berpengaruh terhadap menurunnya kualitas atau hasil belajar siswa SMA, namun sebaliknya dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang dilihat dari nilai siswa yang memenuhi KKM 80% dari jumlah siswa yang menjadi sampel penelitian yaitu 95 siswa. Selain hasil analisis perhitungan ketuntasan hasil belajar siswa, juga respon siswa terhadap penerapan pendidikan gratis begitu antusias, Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket (kuisioiner) bahwa 64 siswa (42 + 22) atau 67% siswa menjawab setuju dan sangat setuju. Artinya sebagian besar atau mayoritas siswa SMA Kelas XI setuju dengan penyelenggaraan pendidikan gratis.³⁸

Selain itu untuk memperkuat pernyataan tersebut, kemudian data interval tersebut juga dapat dianalisis dengan menghitung jumlah skor jawaban berdasarkan skoring dari setiap jawaban siswa. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah skor ideal (Skor Tertinggi) = $5 \times 95 = 475$ (semua jawaban SS). Berdasarkan data tersebut maka tingkat respon siswa (SS) terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis = $(335:475) \times 100\% = 70.5\%$ dari sebenarnya yang diharapkan (100%) sehingga dapat disimpulkan sebagian besar atau mayoritas siswa setuju dan sangat setuju dengan penerapan pendidikan gratis. Didamping itu, jika dilihat dari perhitungan korelasi yang ditinjau dari nilai Ftabel dan nilai Fhitung bahwa dapat disimpulkan Fhitung > Ftabel artinya ada hubungan penerapan pendidikan gratis dengan mutu pendidikan atau hasil belajar, maka dalam hal ini penerapan pendidikan gratis tidak berdampak pada

³⁷ Latip and Wafiqni.

³⁸ Muzakkir Muzakkir, "PERSEPSI SISWA TENTANG PENERAPAN PENDIDIKAN GRATIS HUBUNGANNYA DENGAN MUTU PENDIDIKAN SISWA SMAN 1 WOJA KABUPATEN DOMPU," *Jurnal Teknologi Pendidikan : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pembelajaran* 2, no. 2 (October 10, 2017): 68-75, <https://doi.org/10.33394/jtp.v2i2.595>.

menurunnya hasil belajar siswa, karena mayoritas atau sebagaian besar hasil belajar siswa diatas rata-rata atau memenuhi KKM.³⁹

Ketiga, Nita Andriani dan Sujianto tahun 2014 tentang Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Siak yang menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak masih belum berjalan dengan baik. Artinya dalam proses implementasinya masih ada hal-hal yang belum terpenuhi, seperti penerapan isi kebijakan, pengaruh lingkungan implementasi dan pencapaian hasil kebijakan. Dalam penerapan isi kebijakan implementasinya belum maksimal karena masih ada kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Kemudian apabila dilihat dari pengaruh lingkungan implementasi masih terlihat rendahnya kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana kebijakan dalam implementasinya. Selanjutnya apabila dilihat dari pencapaian hasil kebijakan yang belum sesuai juga dikarenakan oleh rendahnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat.⁴⁰

Keempat, Luthfi Zulkarmain tahun 2020 tentang analisis mutu input, proses, output MTs Assalam Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Temuan penelitian Zulkamain menyebutkan bahwa MTs Assalam meskipun di usianya yang masih belia (baru beroperasi mulai 2017) telah dilaksanakan pengelolaan sesuai standar pengelolaan pada aspek input, proses dan outputnya. Input tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan dengan eksklusif dan inklusif.

Berdasarkan hasil-hasil temuan penelitian di atas, terlihat dengan jelas, bahwa hanya penelitian Andriani & Sujianto tahun 2014 yang menyatakan penyelenggaraan pendidikan gratis belum berjalan dengan baik. Tetapi 3 hasil penelitian terbaru menunjukkan hasil terbalik. Pelaksanaan pendidikan gratis telah diimplementasikan secara baik dan memenuhi standar nasional pendidik, dan juga tuntutan akreditasi.

Penutup

Pendidikan Gratis adalah pendidikan yang membebaskan siswa dari segala pungutan biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan pendidikan tersebut, baik pada

³⁹ Muzakkir.

⁴⁰ Nita Andriani and Sujianto ', "IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS," *Jurnal Kebijakan Publik* 5, no. 3 (September 4, 2014): 23–30, <https://doi.org/10.46730/jkp.5.3.p.23-30>.

aspek input, proses, maupun keluarannya. Di Indonesia, pendidikan gratis diwujudkan dalam Program Wajib Belajar, dan Program Indonesia Pintar (PIP). Meskipun pada tataran implementasi pendidikan gratis masih ditemukan berbagai pungutan yang dibebankan kepada siswa, namun secara umum dapat disimpulkan telah berjalan dengan baik, memenuhi standar mutu pendidikan dan juga tuntutan akreditasi.

Daftar Pustaka

- Andriani, Nita, and Sujianto '. "IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS." *Jurnal Kebijakan Publik* 5, no. 3 (September 4, 2014): 23-30. <https://doi.org/10.46730/jkp.5.3.p.23-30>.
- "Arti Kata Gratis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed May 16, 2022. <https://kbbi.web.id/gratis>.
- Citra, Desy Eka. "Fenomena Pendidikan Gratis Dalam Pembiayaan Pendidikan." *At-Ta'lim : Media Informasi Pendidikan Islam* 14, no. 2 (October 19, 2017): 304-18. <https://doi.org/10.29300/attalim.v14i2.276>.
- DetikNews. "Kampanye Sekolah Gratis Dinilai Hanya Janji Surga." detiknews, 2007. <https://news.detik.com/berita/d-810468/kampanye-sekolah-gratis-dinilai-hanya-janji-surga->.
- Ema. "Definisi Sekolah Gratis Perlu Diluruskan." Sripoku.com, February 10, 2010. <https://palembang.tribunnews.com/02/08/2010/definisi-sekolah-gratis-perlu-diluruskan>.
- Endrawan, Saufat. "Gratis Sembako, Ratusan Warga Rela Antri Vaksin : Okezone Video." <https://video.okezone.com/>, July 7, 2021. <https://video.okezone.com/play/2021/07/07/1/136080/gratis-sembako-ratusan-warga-rela-antri-vaksin>.
- HP3342. "Dasar Hukum Wajib Belajar 12 Tahun." *SUKA SUKA* (blog), May 26, 2018. <https://hp3342.wordpress.com/2018/05/26/dasar-hukum-wajib-belajar-12-tahun/>.
- JawaPos.com. "Wajib Belajar 12 Tahun Dikatakan Bisa Tekan Perkawinan Anak." JawaPos.com, December 4, 2020. <https://www.jawapos.com/nasional/04/12/2020/wajib-belajar-12-tahun-dikatakan-bisa-tekan-perkawinan-anak/>.
- Kompasiana.com. "Begini Rasanya Berdesakan Antri Sembako Gratis." KOMPASIANA, July 20, 2013. <https://www.kompasiana.com/estherlima/55290c7e6ea834261f8b45b6/begini-rasanya-berdesakan-antri-sembako-gratis>.
- . "Tanggapan Masyarakat Mengenai Pendidikan Gratis." KOMPASIANA, May 3, 2017. <https://www.kompasiana.com/nurulsaspriahdianti/5909176bb993735c3914bda5/tanggapan-masyarakat-mengenai-pendidikan-gratis>.

- Latif, Hasriyani. "Buruan! Ada Promo Minyak Goreng Gratis di Indomaret Hari Ini Kamis 20 Januari 2022, Simak Cara Dapat." *Tribun-timur.com*, February 20, 2022. <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/20/buruan-ada-promo-minyak-goreng-gratis-di-indomaret-hari-ini-kamis-20-januari-2022-simak-cara-dapat>.
- Latip, Asep Ediana, and Nafia Wafiqni. "ANALISIS MUTU IMPLEMENTASI PENDIDIKAN GRATIS DI JABODETABEK." *JMIE (Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education)* 1, no. 1 (May 31, 2017). <https://doi.org/10.32934/jmie.v1i1.27>.
- Media, Kompas Cyber. "Emak-emak Meninggal Saat Antre Minyak Goreng, Pengamat: Memilukan... Halaman all." *KOMPAS.com*, March 12, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/03/12/191131678/emak-emak-meninggal-saat-antre-minyak-goreng-pengamat-memilukan>.
- Muzakkir, Muzakkir. "PERSEPSI SISWA TENTANG PENERAPAN PENDIDIKAN GRATIS HUBUNGANNYA DENGAN MUTU PENDIDIKAN SISWA SMAN 1 WOJA KABUPATEN DOMPU." *Jurnal Teknologi Pendidikan: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pembelajaran* 2, no. 2 (October 10, 2017): 68-75. <https://doi.org/10.33394/jtp.v2i2.595>.
- Omat. "Pendidikan Gratis Tingkatkan Animo Masyarakat Masuk SMA." *Orbit Banten*, July 4, 2019. <http://orbitbanten.co.id/pendidikan-gratis-tingkatkan-animo-masyarakat-masuk-sma/>.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163716/permendikbud-no-10-tahun-2020>.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138486/permendikbud-no-19-tahun-2016>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Accessed June 13, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4861/pp-no-47-tahun-2008>.
- Permendikbud No. 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 [JDIH BPK RI]. Accessed June 18, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163918/permendikbud-no-37-tahun-2010>.
- PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan [JDIH BPK RI]. Accessed June 18, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021>.
- Roni, Rusman. "PENDIDIKAN GRATIS BERBASIS 5 PILAR MANAJEMEN MUTU TERPADU." *Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan* 3, no. 2 (2009). <http://www.ejournal.sumselprov.go.id/ppptk/article/view/173>.
- Sancaya, Rengga. "Potret Warga Antre Sembako Gratis saat PSBB." *detiknews*, September 25, 2020. <https://news.detik.com/foto-news/d-5187601/potret-warga-antre-sembako-gratis-saat-psbb>.

- Saparuddin. "Pengaruh Pendidikan Gratis terhadap Motivasi Belajar Siswa MIS Yapit Bontosunggu Pattabakkan Kec.Tompobulu Kab. Gowa." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6319/1/SAPARUDDIN_opt.pdf.
- Sasongko, Agung. "Capres Kampanye Sekolah Gratis Kurang Relevan." *Republika Online*, May 2, 2014. <https://republika.co.id/berita/nasional/politik/14/05/02/n4y7d6-capres-kampanye-sekolah-gratis-kurang-relevan>.
- Suderadjat, Hari. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK*. Bandung: Cipta Lekas Grafika, 2005.
- Suhendar. "Harga Minyak Goreng dan Sembako Naik, Warga Antusias Dapat Sembako Gratis." *TvOneNews*, March 23, 2022. <https://www.tvonenews.com/daerah/jabar/33035-harga-minyak-goreng-dan-sembako-naik-warga-antusias-dapat-sembako-gratis>.
- Turmidzi, Imam. "PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERMUTU DI MADRASAH." *Tarbawi: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 4, no. 2 (August 21, 2021): 165–81. <https://doi.org/10.51476/tarbawi.v4i2.264>.
- Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen. Accessed June 11, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Accessed June 11, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>.
- Usman, Husaini. *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Wisudawati, Diyan Nur Rakhmah. "Isu Pendidikan dalam Kampanye Politik." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 20, no. 4 (December 18, 2014): 579–87. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i4.167>.